

TESIS
PERAN BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS) DALAM
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI RSUD R. MOH. NOH NUR
KABUPATEN BOGOR UNTUK MEWUJUDKAN HAK ATAS
PELAYANAN KESEHATAN



Medityas Winda Krissinta
NIM 23.C2.0109

PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

TESIS
PERAN BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS) DALAM PELAYANAN
TRANSFUSI DARAH DI RSUD R. MOH. NOH NUR KABUPATEN
BOGOR UNTUK MEWUJUDKAN HAK ATAS PELAYANAN
KESEHATAN



Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2
Program Studi Magister Hukum Kesehatan

diajukan oleh
Meditas Winda Krissinta
NIM: 23.C2.0109

PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTRAK

Pelayanan darah merupakan pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam mendukung keselamatan pasien, khususnya dalam kasus pendarahan termasuk pendarahan pada wanita hamil, anemia berat, trauma, tindakan operasi, dan pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis. Ketersediaan darah dan produk darah yang aman dan berkualitas sangat penting untuk memenuhi kebutuhan medis dan mengurangi risiko kematian. Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan darah yang memenuhi standar keamanan, mutu, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan bagi masyarakat.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan tentang peran, pelaksanaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bank darah rumah sakit (BDRS) dalam pelayanan transfusi darah. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD R. Moh. Noh Nur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jarak dari RSUD R. Moh. Noh Nur Kabupaten Bogor ke PMI Kabupaten Bogor dan ke PMI Kota Bogor cukup jauh dan lama perjalanan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, Proses analisis dilakukan melalui wawancara mendalam metode *purposive sampling*, observasi lapangan dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BDRS telah memiliki dasar hukum dan melaksanakan pelayanan sesuai standar melalui pelayanan 24 jam, kerja sama dengan PMI, pengendalian mutu, monitoring dan evaluasi, serta pencatatan pelayanan. BDRS juga menjalankan peran fakultatif melalui pelaporan reaksi transfusi, kegiatan donor darah, dan edukasi keluarga pasien. Pelaksanaan peran BDRS dipengaruhi faktor yuridis, sosial, dan teknis. Diperlukan penguatan regulasi pusat dan daerah serta peningkatan tata kelola, sumber daya manusia, dan sarana pendukung untuk mengoptimalkan pelayanan transfusi darah dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Peran, Hak atas pelayanan kesehatan, Pelayanan darah, RSUD R. Moh. Noh Nur, Kabupaten Bogor

ABSTRACT

Blood services are health services that play an important role in supporting patient safety, especially in cases of bleeding including bleeding in pregnant women, severe anemia, trauma, surgery, and chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis. The availability of safe and quality blood and blood products is very important to meet medical needs and reduce the risk of death. The government is obliged to guarantee the provision of blood services that meet standards of safety, quality, accessibility and continuity of service for the community.

The aim of the research is to determine the regulation of the role, implementation and factors that BDRS in blood transfusion services. This research was carried out at RSUD R. Moh. Noh Nur, Bogor Regency, West Java. Distance from RSUD R. Moh. Noh Nur Bogor Regency to PMI Bogor Regency and to PMI Bogor City is quite a long and long journey. The research method uses a juridical-sociological method with a qualitative approach. The analysis process is carried out through in-depth interviews using purposive sampling method, field observation and literature study.

The research results show that BDRS has a legal basis and carries out services according to standards through 24-hour service, collaboration with PMI, quality control, monitoring and evaluation. BDRS also plays a facultative role through reporting transfusion reactions, blood donation activities, and educating patient families. The execution of these BDRS roles is influenced by legal, social, and technical factors. Strengthening of central and regional regulations is needed, as well as improving governance, human resources, and supporting facilities to optimize blood transfusion services in fulfilling the right to health services.

Keywords: Role, Right to Health Services, Blood Services, RSUD R. Moh. Noh Nur, Bogor Regency